

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
LAYANAN PEER TO PEER LENDING FINTECH
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

(Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)



Skripsi

**Hendri Sutanto
Npm. 1651020479**

Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA
LAYANAN PEER TO PEER LENDING FINTECH
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**
(Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (SE)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh:

**Hendri Sutanto
Npm. 1651020479**

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

Pembimbing II : Fatih Fuadi, M.S.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Pembentukan dari OJK adalah untuk menyelenggarakan system pengawasan dan pengaturan secara keseluruhan, khususnya dalam kegiatan sector keuangan, baik itu pada lembaga non-bank maupun perbankan. OJK memiliki tiga tujuan yaitu mewujudkan sector jasa keuangan kontributif pada pemerataan kesejahteraan, mewujudkan sector jasa keuangan yang stabil, berdaya asing, dan mewujudkan jasa keuangan yang inklusif untuk masyarakat dengan melakukan perlindungan pada konsumen secara kredibel.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan apa yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen pengguna jasa *peer to peer lending* dan apa saja sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan apabila pihak pelaku jasa keuangan melanggar ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website. Subjek penelitian ini adalah pihak borrower (Peminjam) dari Aplikasi Peer to Peer Lending.

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan. Dan apabila pelaku jasa keuangan melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh OJK akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang tertera dalam peraturan Nomor:1/POJK.07/2013 apabila suatu pelaku jasa keuangan melanggar ketentuan dalam peraturan OJK akan dikenakan sanksi administrative yaitu peraturan tertulis, Denda atau membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, serta Pencabutan izin kegiatan usahanya.

Kata Kunci: Peraturan OJK Dalam Melindungi Konsumen Pengguna Jasa *peer to peer lending*

ABSTRACT

The establishment of the OJK is to implement and overall supervisory and regulatory system, particularly in the activities of the financial sector, both for non-bank and banking institutions. Foreign countries, and realizing financial services that are inclusive for the community by providing credible consumer protection.

This study aims to find out what regulations are issued by the Financial Services Authority institutions to protect consumers who use peer to peer lending services and what are the sanction issued by the Financial Services Authority institutions if the financial services actors violate the provisions in the Financial Services Authority regulations. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Sources of data come from primary data in the form of interviews and secondary data in the form of books and websites. The subject of this research is the borrower from the Peer to Peer Lending Applications.

In this case, the Financial Services Authority issued regulation Number 1 POJK.07.2013 concerning Consumers Protection in the Financial Services Sector. And if financial services actors violate or do not comply with the regulations made by OJK, they will receive sanctions as stated in regulation Number 1 POJK07/2013 Article 53 if a financial services actor violate the provisions in the OJK regulations, he will be subject to sanctions administrative, namely written regulations, fines or paying a certain amount of money, restrictions on business activities, freezing of business activities, and revocation of business licenses.

Keywords : *OJK Regulations in Protection Consumer Users Peer to Peer Lending Services*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Banda Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Hendri Sutanto
NPM : 1651020479
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer to Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi,

Bandar Lampung,

Penulis,



Hendri Sutanto

NPM. 1651020479



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Banda Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait
Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer to
Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif
Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa
Keuangan Lampung)**

**Nama : Hendri Sutanto
NPM : 1651020479
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009**

**Fatih Fuadi, M.S.I
NIP. 198512192015031006**

**Mengetahui Ketua Jurusan
Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 1982080820112009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Banda Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer to Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)”** disusun oleh Hendri Sutanto, NPM: 1651020479, Program studi Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua: Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. (.....)

Sekretaris: Gustika Nurmalia, M.Ek. (.....)

Penguji I: Dr. Nasruddin, M.Ag. (.....)

Penguji II: Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. (.....)

Penguji III: Fatih Fuadi, M.S.I. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

08012003121001

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

(Q.S Al-Baqarah: 245)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Grafindo, 1994) hlm. 23

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya disetiap proses penulisan skripsi ini, begitu juga atas takdir dan segala nikmat-Nya, Kau jadikan hambamu ini senantiasa selalu bersyukur, berdo'a, dan berusaha serta bersabar dalam menjalani takdir kehidupan di dunia ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula untuk selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan serta kerendahan hati, skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, serta rasa hormat kepada:

1. Ayahanda tercinta Suratija dan Ibuku Zulifa dan Adik-adikku Heni Rizka Sari dan Risa Rizki Andini terimakasih atas do'a, dukungan, kesabaran, dan kasih sayang, serta pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keselamatan dan kesehatan, serta disetiap langkah ibu dan ayah selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dimana menjadi tempat penulis mencari ilmu, semoga selalu diberi kejayaan sehingga dapat melahirkan generasi-generasi terbaik.

RIWAYAT HIDUP

Hendri Sutanto, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 11 Agustus 1997, anak sulung dari pasangan Bapak Suratija dan Ibu Zulifa. Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Tanggamus dan selesai pada tahun 2010, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 Tanggamus dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas (SMAN) 2 Kotaagung, Tanggamus dan selesai pada tahun 2016 serta mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer to Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)”**, sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar S1 Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Besar Umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa manusia ke peradaban hidup yang lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa selama proses penulisan tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghafar, S.Ag., M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Erike Anggraeni, D.B.A. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Muhammad Kurniawan, S.R., M.E.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
3. Ibu Erike Anggraeni, D.B.A selaku Pembimbing Akademik I dan Bapak Fatih Fuadi M.S.I. selaku Pembimbing Akademik II yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi serta sumber referensi yang dibutuhkan dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Kepada sahabat-sahabat penulis tercinta, Anisa Dahlia, Ananda Lifiyan Kuswanto, Yobi Hartadi, Marjupansyah, Muhammad Rizki, Nur Ramadhani, Harist Hammam, Ridho Febriansyah dan Youri Djorkaef yang ikut serta memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Terima kasih atas masukan dan saran serta doa dan dukungan yang telah diberikan.
7. Sahabat seperjuangan khususnya Kelas G Perbankan Syariah Angkatan 2016 yang selalu mendukung dan bertukar semangat selama proses perkuliahan.
8. Anggota kelompok KKN 55 yang telah berbagi kehidupan selama 40 hari dan sampai sekarang masih bertukar kabar serta doa.
9. Almamater tercinta tempat penulis menimba ilmu, yaitu UIN Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah tempat penulis menuntut ilmu dan mendapatkan pengalaman serta pembelajaran.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, diharapkan sekiranya pembaca dapat memberikan saran dan masukan guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan ilmu yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,

Penulis

Hendri Sutanto
Npm.1651020479

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
H. Kerangka Berfikir	21
I. Metode Penelitian	22
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Konsumen	29
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	29
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	31
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	32
4. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam	34
B. Otoritas Jasa Keuangan	36
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	36
2. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.....	39

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	41
4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	44
5. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen ..	45
C. Peer to Peer Lending	48
1. Pengertian Peer to Peer Lending	48
2. Manfaat Peer to Peer Lending	49
3. Kelebihan dan Kekurangan Peer to Peer Lending	51
4. Uraian Akad Peer to Peer Lending	52
D. Maqashid Syariah.....	53
1. Definisi dan Teori Maqashid Syariah.....	53
2. Maksud dan Tujuan Syariah.....	57
3. Konsep Maqashid Syariah.....	58
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Sejarah Berdirinya OJK di Provinsi Lampung ...	61
2. Visi dan Misi OJK Lampung	62
3. Struktur Organisasi OJK Lampung	63
B. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	64
 BAB IV : ANALISIS DATA	
A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer to Peer Lending di Provinsi Lampung	71
B. Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Layanan Peer to Peer Lending Fintech Pada Otoritas Jasa Keuangan lampung	78
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
 DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Struktur Kepengurusan OJK Lampung.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Wawancara Hasil Penelitian

Lampiran 2. Gambaran Lokasi Tempat Penelitian

Lampiran 3. Daftar Perusahaan *peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin di OJK

Lampiran 4. Daftar Perusahaan Fintech yang tidak terdaftar di OJK



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penegasan judul, penulis akan lebih menekankan pada uraian, dan makna dari beberapa proposisi bersangkutan dalam permasalahan penelitian yang sedang digeluti penulis. Lalu dengan adanya penegasan bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan kerangka pikir, serta mempermudah dalam memahami maksud dari pada penelitian tersebut.

Adapun Judul skripsi ini adalah **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer to Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)”**.

1. Peran

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh kedudukan di masyarakat.¹ Istilah peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang.

2. Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.²

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 845

² Siti Sundari, “Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan”, (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 44

untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya.³

4. Peer to Peer Lending

Peer to peer lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara langsung berbasis teknologi informasi antara penerima pinjaman (*lender*) dengan pemberi pinjaman (*borrower*) secara online didalam suatu wadah atau *marketplace*.⁴

5. Fintech

Fintech merupakan suatu inovasi pada sector finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern, menggunakan sistem perangkat lunak sebagai penyedia layanan keuangan.⁵

6. Perspektif merupakan sudut pandang atau pandangan.⁶

7. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan tuntutan, maksud atau tujuan yang hendak dicapai dari sebuah penetapan hukum.⁷

³ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 45

⁴ Hadad, Muliaman D, "Financial Technology di Indonesia". (Makalah yang disampaikan pada Acara Kuliah Umum tentang Fintech – IBS, yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, Jakarta 10 Mei 2017)

⁵ Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 3 (Januari 2017), h. 56

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, h. 1011

⁷ Ghofar Sidiq, "Teori Maqashid Al- Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 5 (Agustus 2009), h. 118

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Secara Objektif

Saat ini *fintech* menjadi sebuah *trend* tersendiri di masyarakat khusus di Indonesia. Masyarakat mulai menyadari pentingnya *fintech* untuk memenuhi kebutuhan baik saat ini maupun untuk masa depan. Namun hal tersebut menjadi peluang bagi para oknum tidak bertanggungjawab. Para pelaku kejahatan di bidang *fintech* semakin bertambah. Maraknya penawaran fintech ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab membuat masyarakat semakin resah. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dibidang *fintech* menjadi sasaran utama. Layanan pinjam meminjam yang ditawarkan mengandung unsur *tadlis* atau penipuan dan melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam islam. Hal tersebut jelas dilarang oleh agama, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertugas dalam mengawasi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank di Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam menciptakan kondisi keuangan yang sehat. Apakah ada kebijakan tertentu yang dikeluarkan OJK dalam rangka mengawasi kegiatan Fintech khususnya pada layanan *Peer to Peer Lending* di Provinsi Lampung.

2. Penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, serta didukung oleh tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pendorong dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang salah satunya Otoritas Jasa Keuangan yakni untuk sektor jasa keuangan yang efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa sekarang.⁸

Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini di pertegas yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen masyarakat.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dilihat berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:⁹

Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun

⁸ Theresia Anita Christiani, 2016, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 81

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

3. Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan beberapa kewenangan yang diatur pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 9 huruf c, dalam pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan perlindungan Konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Maka kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan Konsumen diatur lebih lanjut di dalam beberapa pasal yakni:¹⁰ Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen yang meliputi :

1. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen yang meliputi:
 - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
 - b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
 - c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.¹¹

¹⁰ *Ibid*, h.24

¹¹ *Ibid*, h.26

2. Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
 - a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan
 - b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan
 - c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹²
3. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pelayanan Pengaduan Konsumen yang meliputi:
 - a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan
 - b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan
 - c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menindak lanjuti mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat tersebut maka berdasarkan Pasal 31 ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan amanat Pasal 31 tersebut maka dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹² *Ibid*, h.23

1/POJK .07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.¹³

Berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, tujuan dari perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan yakni untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.¹⁴

Salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan jika melihat berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan layanan aduan Konsumen, sehingga sehubungan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka penerimaan pengaduan Konsumen diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dapat menerima pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan terhadap Konsumen yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen serta berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁵

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penyelesaian sengketa Konsumen hanyalah sebagai lembaga jasa keuangan yang memfasilitasi untuk penyelesaian sengketa antara Konsumen yang menyelesaikan penyelesaian sengketa Konsumen tersebut secara langsung. Pada Januari hingga Juli 2016,

¹³ *Ibid*, h.26

¹⁴ Irham Fahmi, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 16

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan, (Jakarta: 2014) h 4

persoalan yang paling banyak dikeluhkan Konsumen adalah di sektor perbankan dan industri keuangan non-bank.¹⁶

Pada bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, selama tahun 2020, OJK Provinsi Lampung menerima 588 layanan, yang terdiri dari 361 penerima informasi, 202 pemberian informasi dan 25 pengaduan dengan dominasi permasalahan yang terkait masalah lembaga keuangan non-bank. Selain melakukan edukasi dan perlindungan konsumen, OJK bersama Satgas Investasi telah menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait berbagai entitas yang berpotensi merugikan masyarakat dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersama dengan 12 kementerian dan kelembagaan lainnya yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi. Hingga tahun 2020, Satgas Waspada Investasi telah menangani sebanyak 976 investasi ilegal, 2923 pinjaman online ilegal serta 143 gadai ilegal. Sedangkan dari ribuan entitas pinjaman online ilegal, per 22 Januari 2021 terdapat sebanyak 149 perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin resmi di OJK.¹⁷ Adapun Masalah atau Aduan yang paling sering dikeluhkan oleh konsumen dari sector jasa keuangan *peer to peer lending* kepada lembaga otoritas jasa keuangan diantara lain sebagai berikut:

1. Pengancaman
2. Penyadapan data
3. Penyebaran data pribadi
4. Pengiriman gambar porno
5. Manipulasi data

¹⁶ Koran KOMPAS, edisi 12 Agustus 2016, h. 20

¹⁷ “Merasa Dirugikan Lembaga Keuangan?Laporkan Melalui APPK” (On-Line), tersedia di: <https://hearline.co.id/merasa-dirugikan-lembaga-keuangan-laporkan-melalui-appk.htm> (20 Juni 2021)

6. Illegal akses

Banyaknya aduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan memang tidak menjamin bahwa semua aduan dapat atau menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk difasilitasi penyelesaiannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya aturan mengenai syarat dan kualifikasi aduan mana saja yang dapat diberikan fasilitas untuk penyelesaian pengaduan Konsumen. Melihat dari banyaknya aduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, tentunya diperlukan adanya peraturan yang mumpuni untuk melindungi kepentingan Konsumen khususnya mengenai pengaduan Konsumen.¹⁸

Berdasarkan aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sudah dapat memberikan perlindungan terhadap Konsumen dan dapat dikatakan sudah mumpuni, walaupun hanya saja masih terdapat kelemahan di dalam aturan tersebut salah satunya adalah tidak adanya aturan mengenai jangka waktu pemberian tanggapan untuk penindak lanjutan penyelesaian aduan yang diberikan Konsumen terhadap Otoritas Jasa Keuangan, sehingga hal tersebut memunculkan adanya ketidakpastian dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan dari Konsumen.¹⁹

OJK baru saja merilis daftar *peer to peer lending* yang tidak berizin alias illegal. 182 entitas diantaranya sudah berhasil diberhentikan operasinya karena didirikan tanpa pengawasan diberpotensi membahayakan masyarakat. Karena

¹⁸ Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta : Raih Asa Sukses,2014). h 111

¹⁹ *Ibid*, h.13

benar *peer to peer lending* ini memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan iming-iming imbal hasil yang tinggi dan tidak wajar bahkan sejak 2018 ada lebih 1895 entitas yang sudah berhasil ditangkap oleh Satgas Waspada Investasi. Dan 42% diantaranya tidak diketahui asalnya 22% berasal dari Indonesia dan 15% berasal dari Amerika Serikat selain itu juga masih ada dari Negara-negara lain. Tapi memang tantangannya dalam dunia digital ini adalah karena fintech-fintech tersebut bisa saja beroperasi kembali dengan nama yang berbeda, sehingga memerlukan waktu lagi bagi penegak hukum untuk menyelidiki dan akhirnya melakukan pemberhentian. Apa saja *modusnya* diantaranya adalah:

1. Perdagangan Forex tanpa izin sekitar 164 temuan
2. Investasi Money Game sekitar 8 temuan, investasi ini menawarkan skema investasi piramida kurang lebih seperti multilevel marketing dan tingginya keuntungan yang dijanjikan ini sekitar 6% setiap bulannya dan kalau setahun akan mendapatkan laba 15% atau lebih.
3. Equity Crowdfunding ilegal
4. Multi Level Marketing tanpa izin
5. Penawaran Umrah

Secara general memang *peer to peer lending* ini lebih menggiurkan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank misalnya.

Apa saja kelebihan *peer to peer lending* yang ditawarkan untuk peminjam maupun pemberi dana. Yang pertama kita lihat dari peminjam dana terlebih dahulu ada proses pengajuan yang lebih mudah pastinya, persyaratan relative ringan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti Bank, pembayaran yang cenderung lebih fleksibel. Lalu untuk pemberi dana banyak sekali yaitu imbal hasilnya relative

besar, mudah untuk melakukan diversifikasi, bisa dilakukan dengan modal yang kecil. Karena alasan-alasan inilah memang *peer to peer lending* lebih menggiurkan bagi orang-orang yang ingin membuka usaha. Tapi kemudian anda wajib curiga kalau informasi *peer to peer lending* seperti email website alamat yang tidak jelas lalu pemberi pinjaman terkesan mengejar-ngejar atau memaksa anda, lalu juga meminta uang muka hingga meminta informasi pribadi secara berlebihan. Syarat-syarat yang terlalu mudah perlu untuk dicurigai karena pada dasarnya lembaga keuangan itu wajib memastikan kalau peminjam atau pemberi dananya itu benar-benar bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan dana pinjaman. Sebenarnya pemerintah bisa saja mengawasi penuh fintech-fintech ilegal.

Namun, hingga saat ini Undang-Undang Fintech masih belum jelas. Karena aturan ini akan menjadi dasar regulasi yang mengatur dan mengawasi seluruh pihak dan juga menentukan sanksi. Sayangnya ijin fintech selama ini kurang terintegrasi disetiap lembaga. Begini misalnya, bila ada pendirian perusahaan harus meminta ijin ke Kemenkumham, ijin usahanya harus meminta ijin ke OJK lalu ijin pengoprasiaannya harus ke Kemenkominfo dan saat ini kepolisian jadinya mengalami kesulitan karena data yang ada itu tidak jelas mulai dari pemberi pinjamannya siapa, peminjamnya, pemilik perusahaannya hingga sumber dananya dari mana juga tidak jelas dan karena itu juga penindakannya hanya berdasar pada hukum pidana umum, pidana khusus dan *cybercrime*.

Sedangkan peraturan OJK di Peraturan OJK No.77/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Hanya Menindak Pemain yang Legal saja. Maka harusnya undang-undang fintech ini nantinya bisa melengkapi aturan ini, termasuk juga undang-undang

perlindungan data pribadi yang harus hadir untuk melengkapi undang-undang fintech agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi yang sekarang ini sudah sering terjadi. Undang-undang ini masih wacana, jadi dibutuhkan proses yang cukup panjang untuk sampai ke DPR hingga akhirnya diresmikan menjadi undang-undang sementara setiap hari ribuan fintech ilegal terus bertumbuh memberikan penawaran yang menggiurkan meskipun hanya tipuan.²⁰

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini diberi judul: **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer to Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Peraturan apa yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen pengguna jasa Peer to Peer lending?
2. Bagaimana Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Layanan Peer to Peer Lending Pada Otoritas Jasa Keuangan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

²⁰“ Berita Tentang Fintech Lending Terkini” (On-line), Tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com.htm> 19 Juni 2021.

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen pada layanan Peer to peer Lending.
2. Untuk mengetahui pencapaian maqashid syariah terkait perlindungan konsumen layanan peer to peer lending pada otoritas jasa keuangan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.

2. Bagi OJK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan kebijakan atas pengawasan pinjaman dana berbasis per to peer lending.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan menambah informasi mengenai lembaga keuangan Non-bank berbasis *peer to peer lending*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengajukan pinjaman.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini penulis merujuk beberapa sumber dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “ Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggara *Peer to Peer Lending* (TUNAIKU) yang batal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan” yang ditulis oleh Ivana Ningrum, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis-normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan atas kerugian dalam penyelenggara *Peer to Peer Lending* (Tunaiku) yang batal terdaftar di OJK.

Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah saat ini konsumen penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah maupun instansi lainnya. Kerugian yang dirasakan oleh masyarakat juga hasil dari kurangnya edukasi maupun pemahaman dari pemerintah atau instansi lain kepada masyarakat. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, konsumen pengguna jasa peminjam uang berbasis teknologi mendapatkan payung hukum dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan untuk *fintech* illegal perlindungan hukum atas konsumen sangat lemah karena Otoritas Jasa Keuangan tidak berwewenang mengawasi *fintech* illegal. Adanya

kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk membatalkan tanda terdaftar bagi *fintech* yang melanggar ketentuan akan menambah pula kerugian bagi konsumen. Kemungkinan yang terjadi adalah ketika *fintech* masih terdaftar tetapi melakukan kesalahan yang merugikan konsumen dan setelah konsumen mengajukan aduan tetapi *fintech* tersebut sudah ditarik tanda terdaftar maka perlindungan konsumennya juga menjadi lemah. Dikarenakan OJK tidak lagi mengawasi *fintech* tersebut. Pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan meminjam uang kepada *fintech* ilegal atau tidak terdaftar dan berizin.²¹

Penelitian ini memiliki kesamaan yang dilakukan oleh Ivana Ningrum yaitu sama-sama menganalisa mengenai peran OJK dalam kegiatan yang berkaitan dengan *peer to peer lending* khususnya pada perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada metode penulisan, penelitian yang dilakukan oleh Ivana Ningrum menggunakan metode yuridis normative yaitu penelitian hukum yang menganalisa melalui tinjauan-tinjauan pustaka sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian lapangan sehingga informasi didapat oleh peneliti lebih jelas dikarenakan sumber berasal dari OJK langsung dan lebih terjamin keabsahannya. Selain itu juga peneliti menambahkan variabel bebas pada penelitian ini yaitu tinjauan maqashid syariah. Ivana Ningrum melakukan penelitian di tahun 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.

²¹ Ivana Ningrum, "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggara *Peer to Peer Lending* (TUNAIKU) yang batal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Lampung". (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2019), h. 96-98

2. Karya Ilmiah yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)”. Yang ditulis oleh Ni Kadek Puspa Pranita dan I wayan Suardana, Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, 2017.

Dalam karya ilmiah ini peneliti mengangkat dua permasalahan terkait dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh nasabah sebagai pengguna layanan *fintech* dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengembangan bisnis tersebut. Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah dan peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap nasabah pengguna layanan *fintech* di Indonesia.

Adapun hasil temuan penulisan jurnal ilmiah ini yaitu bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindak-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. Kemudian OJK juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktifitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum. Peran dari OJK dalam memberikan Perlindungan Konsumen terdapat pada UU Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi yang selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Kewenangan OJK dengan diberlakukannya peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dalam kenyataannya belum mencerminkan kepastian hukum baik dalam memberikan sanksi maupun dalam penerapan peraturan itu sendiri sehingga belum terwujudnya keadilan yang dirasakan bagi para pihak didalamnya baik itu sebagai kreditor maupun debitor.²²

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Puspa Pranita dan I wayan Suardana yaitu sama-sama mengangkat permasalahan terkait peran OJK terkait perlindungan konsumen oleh nasabah *fintech*. Perbedaan antara keduanya terletak pada metode penelitian yang digunakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Puspa Pranita dan I wayan Suardana menggunakan metode hukum normative. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis atau penelitian lapangan dengan memperoleh sumber penelitian secara langsung di kantor OJK sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dengan lebih terjamin keabsahannya. Dan peneliti menambahkan satu variabel bebas yaitu maqashid syariah untuk dijadikan landasan dalam penelitian ini. Ni Kadek Puspa Pranita dan I wayan Suardana melakukan penelitian di tahun 2017 sedangkan penelitian dilakukan pada tahun 2020.

²² Ni Kadek Puspa Pranita dan I wayan Suardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)". *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2017), h. 13-14.

3. Skripsi yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)” yang ditulis oleh Gusti Herman, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan. Apabila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran OJK dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan Hukum bagi konsumen.

Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 yaitu ada dua perlindungan hukum secara Preventif dan perlindungan hukum secara Represif. Adapun upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu pertama mediasi, cara

penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Kedua adjudikasi, cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya. Ketiga Arbitrasi, cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.²³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Herman yaitu sama-sama menggunakan penelitian deskriptif atau data lapangan dan juga menggunakan objek penelitian OJK dalam pemberian perlindungan konsumen pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Selain itu, Gusti Herman dan juga peneliti sama-sama melakukan penelitian di tahun 2020. Dibalik kesamaan metode lapangan yang ada, kedua penelitian ini tetap memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada penambahan jumlah metode penelitian yang dilakukan oleh Gusti Herman yaitu menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan. Serta penambahan jumlah variabel bebas yang dilakukan oleh peneliti yaitu maqashid syariah.

²³ Gusti Herman, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi". (*Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020), h. 81-82

4. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19”. Yang ditulis oleh Kornelius Benuf, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang 2020.

Permasalahan ini akan dibahas dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari analitis.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia, juga dirasakan oleh konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*. Hal ini mengakibatkan penerima pinjaman tidak bisa mengembalikan pinjamannya dan pemberi pinjaman tidak bisa menerima pengembalian uang yang telah dipinjamkannya. Sehingga kedua belah pihak ini memerlukan perlindungan hukum yang berupa kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran Covid-19. Oleh karena itu OJK sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sector jasa keuangan di Indonesia perlu mengeluarkan perlindungan hukum terhadap konsumen *fintech* demi menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan ditengah masyarakat pada masa pandemic Covid-19. Bentuk peraturan tersebut yaitu kebijakan pemberian stimulus kepada konsumen *Fintech Lending*.

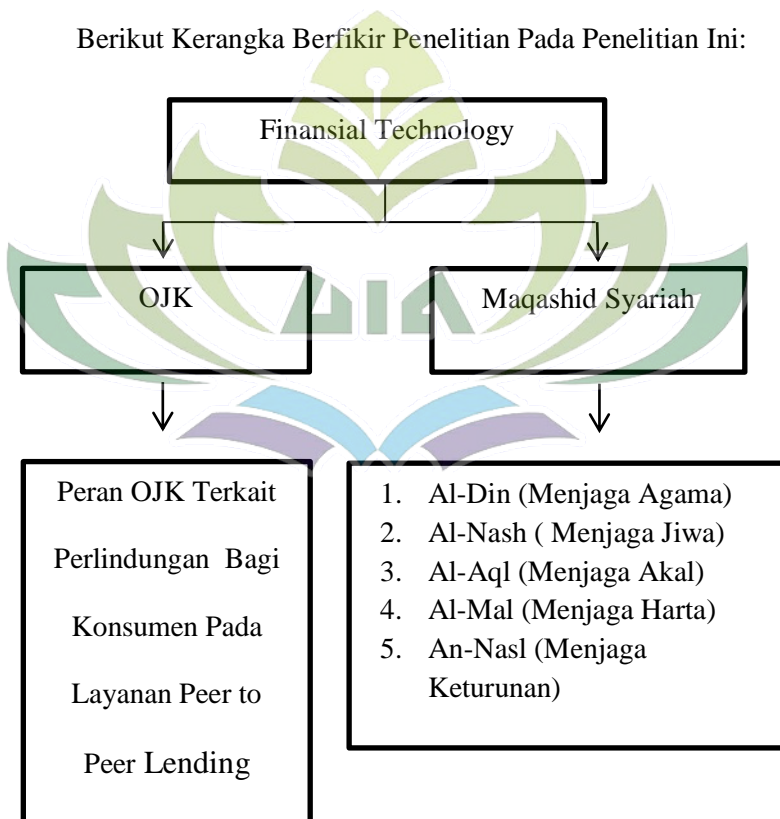
Yang terdiri dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Stimulus artinya adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dalam mengatasi suatu masalah sehingga dapat menyelesaikan persmasalahan tersebut.²⁴

²⁴ Kornelius Benuf, “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 (Agustus 2020), h. 211-213

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganalisa peran OJK terkait perlindungan konsumen. Penelitian oleh Komelius Benuf dan penelitian ini sama-sama dilakukan pada tahun 2020. Sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan. Selain itu variabel bebas yang dilakukan oleh Kornelius Benuf menambahkan dampak dari penyebaran Covid-19. Pada penelitian ini variabel bebas adalah maqashid syariah.

H. Kerangka Berfikir

Berikut Kerangka Berfikir Penelitian Pada Penelitian Ini:



Tabel 1.1

Kerangka Berfikir Penelitian

Berdasarkan tabel tersebut bahwa dijelaskan *Finansial Technology* (FINTECH) memiliki peran tersendiri pada penelitian ini. Dimana OJK selaku Pengawas Lembaga Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam rangka membantu masyarakat terhadap tindak kasus penipuan. Jika sewaktu-waktu konsumen meminta perlindungan hukum maka disinilah peran OJK diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada penelitian ini Maqashid Syariah akan dihubungkan dengan *fintech*, mengingat *fintech* memiliki banyak manfaat bagi kemashalahatan umat. Tentunya dengan banyaknya manfaat tersebut, cara memperolehnya harus berdasarkan Al-Quran dan Hadist agar terhindar dari aktifitas yang bakal merugikan diri sendiri maupun orang lain.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Salah satu syarat agar penelitian ini dapat mencapai derajat ilmiah, maka penulis tidak lepas dari penggunaan beberapa cara atau metode yang masih relevan dengan permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²⁵ Sehingga penelitian ini juga disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

²⁵ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 3

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu serta menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.²⁶ Penelitian deskriptif yang peneliti maksud adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen pada layanan *peer to peer lending* dan bagaimana *fintech* jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

3. Data dan Sumber Data Penelitian

Berikut Data dan Sumber Data Penelitian yang dipakai pada Skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data ini berupa hasil wawancara dan observasi. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung dari bagian perlindungan konsumen OJK Lampung.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 6

²⁷ Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57

informatif.²⁸ Artinya data yang diperoleh berasal dari tangan kedua atau bukan dari sumbernya langsung. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut juga informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian.²⁹ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah bagian pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (Pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh suatu informasi yang diharapkan.

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Menurut Winarto Surahmad, observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan.³⁰

²⁸ *Ibid*, h. 58

²⁹ Lexy. J. Moelg, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 132

³⁰ Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2006), h. 162

Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Observasi partisipan dan observasi non partisipan
- 2) Observasi sistematis dan observasi non sistematis
- 3) Observasi eksperimen dan observasi non eksperimen

Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan metode observasi non partisipan karena peneliti tidak mengambil bagian secara penuh dari aktifitas objek yang diteliti. Metode ini penulis gunakan sebagai metode untuk mencari data tentang kebijakan OJK dalam melindungi konsumen dari segala bentuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan layanan *peer to peer lending* pada kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab biasa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu Tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Dalam penelitian ini penulis ingin mewawancarai salah satu staff yang bertugas dibagian pengawasan OJK Lampung khususnya yang melakukan pengawasan pada layanan *peer to peer lending*.³¹

³¹ V. Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), h. 31

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.³² Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluan peneliti sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkrit.

6. Metode Pengolahan Data

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang telah masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.³³
- b. Pengkodean (*Coding*), yaitu pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumber.

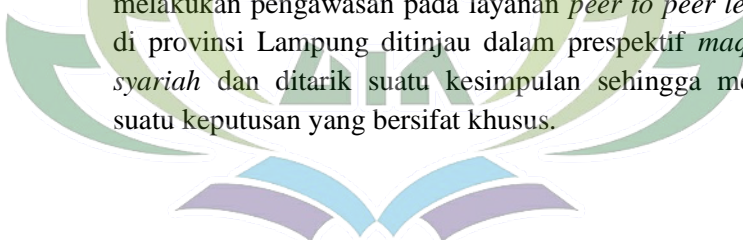
³² *Ibid*, h. 32-33

³³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada cetakan 22, 2011), h. 75

- c. Sistematika Data (*Sistemazing*), bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Diakhir penelitian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menetapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literature yang berkaitan dengan peran OJK dalam melakukan pengawasan pada layanan *peer to peer lending* di provinsi Lampung ditinjau dalam prespektif *maqashid syariah* dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Barang atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan bervariasinya produk yang semakin luas dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, jelas terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Perkembangan yang demikian tersebut, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbukanya kesempatan dan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemauan konsumen.

Namun kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan

promosi, cara penjualan, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen.³⁴

Hal tersebut bukan hanya regional saja, tetapi menjadi permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Maka dari itu timbulnya kesadaran oleh konsumen yang melahirkan salah satu cabang baru dalam ilmu hukum yaitu perlindungan konsumen atau yang dikenal juga dengan hukum konsumen (*Consumers law*).

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari posistif yang sudah ada di seluruh Indonesia ternyata dasar-dasar yang menompang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.³⁵

Analisis Laporan Keuangan adalah suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil

³⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, 2018), h. 6

³⁵ *Ibid*, h. 7

aktivitas perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan performance perusahaan pada masa yang akan datang.³⁶

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah, yaitu ditetapkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka jelaslah sudah bahwa perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha mengenai pengaturannya. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat UUPK, diundangkan pada tanggal 20 April Tahun 1999 dan dinyatakan berlaku efektif mulai tanggal 20 April Tahun 2000, yaitu satu tahun setelah di undangkan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sehingga memperkuat penegakkan hukum dibidang perlindungan konsumen. Selain Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi perlindungan konsumen antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001, Tanggal 21 Juli 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;

³⁶Kariyoto, *Analisa Laporan Keuangan* (Jawa Timur: Universitas Brawijaya Press, 2017), 21

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001, Tanggal 21 Juli 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001, Tanggal 21 Juli 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional.³⁷

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menurut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

³⁷ Agus Suwandono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, 2018), h. 52.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan hukum pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan. Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah konsumen. Hampir seluruh orang yang menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat dapat dikatakan sebagai konsumen. Banyaknya konsumen yang bergantung pada keberadaan suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan.

Tujuan perlindungan konsumen memiliki kesamaan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan konsumen atau pelaku usaha merasa dirugikan. Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha maka perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan atas hak-hak yang diberikan oleh hukum. Masyarakat secara tidak langsung diperhatikan oleh pemerintah dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk

kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak.³⁸

4. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Pelaksanaan perekonomian dalam islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul SAW, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dalam hal di atas, yang tidak kalah penting adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.

Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah Al-Maidah Ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya : “Wahai Rasul, Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”. (Qs. Al-Maidah Ayat 67).

Ayat ini mengingatkan Rasul dalam menyampaikan ajaran agama kepada Ahli Al-Kitab tanpa menghiraukan

³⁸ Yusuf Shoefie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1

ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani.³⁹

Dengan kata lain, ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah untuk merealisasikan kemashalahatan manusia dengan menjamin kebutuhan dan keamanan mereka.⁴⁰

Hadist Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan: “Dari Abu Sa’id bin Sinan al-Khudri ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni).⁴¹

Maksud dari hadist diatas adalah sesama pihak yang melakukan perjanjian hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadi kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.⁴²

Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang terjadi kewajibannya. Dengan saling

³⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2009), h. 354.

⁴⁰ Quraish Shihab, “Tafsir al Misbah”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, (Maret 2012), h. 153

⁴¹ Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), h. 245

⁴² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2009), h. 360

menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi islam.

B. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁴³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata

⁴³ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 44

pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sector jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam system keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas system keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁴⁴

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.⁴⁵ *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengaturan pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.⁴⁶

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggara system pengaturan dan

⁴⁴ Rebekka Dosma Sinaga, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4 No. 2 (Maret 2013), h. 2

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 58

⁴⁶ Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 165

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan.⁴⁷ Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.⁴⁸ Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industry keuangan non-bank. Tugas pengawasan industry keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sector perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.⁴⁹

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan terselenggara secara adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan dibentuknya OJK, maka lembaga ini diharapkan mampu mendukung kepentingan sector jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*,h. 2-3

⁴⁸ Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Alifabeta 2014), h. 47

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc. Cit*

sector jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajiban (*fairness*).⁵⁰

Pada tanggal 29 Desember 2016, OJK telah resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI). Dalam POJK LPMUBTI ini secara khusus hanya mengatur mengenai *peer to peer lending*.⁵¹

2. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri dari tiga hal, yaitu perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34 ayat 1) yang berbunyi “Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang”.

Krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh.

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit*, h. 3

⁵¹ Iwayan Bagus Pratama dkk, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4 (Desember 2018), h. 9

Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal di masa depan.⁵²

Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.

Ide ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur bank sentral Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Rancangan tersebut mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu diajukan, muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Karena terlihat ada pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya.

Nantinya OJK akan mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas

⁵² Andrian Sutedi, *Op.Cit.*, h. 36

mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁵³

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut :

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,

⁵³ *Ibid*, h. 37

konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
 - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank.
 - 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi :
- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
 - 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
 - 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
 - 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.

- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan.
 - 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan enata usahakan kekayaan dan kewajiban.
 - 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara peneanaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank)
- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
 - 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
 - 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter.
 - 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
 - 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- 8) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha. Izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁵⁴

4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Struktur organisasi OJK terdiri atas:

- a. Dewan Komisiner OJK Struktur Dewan Komisiner terdiri atas :
 - 1) Ketua merangkap anggota
 - 2) Wakil ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
 - 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
 - 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
 - 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota.
 - 6) Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
 - 7) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
 - 8) Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

⁵⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*,h. 5-9

- 9) Anggota ex-officia dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
- b. Pelaksana Kegiatan Operasional Pelaksana Kegiatan Operasional Terdiri Atas:
 - 1) Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I.
 - 2) Wakil Ketua Dewan Komisaris memimpin bidang Manajemen Strategis II.
 - 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin Pengawasan Sektor Perbankan.
 - 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin Pengawasan Sektor Pasar Modal.
 - 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
 - 6) Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin pengawasan sektor IKNB.
 - 7) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.
 - 8) Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukas dan Perlindungan Konsumen.⁵⁵

5. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen

Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya adalah pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi, praktek perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum

⁵⁵ *Ibid*,h.13-15

optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Tugas OJK dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 28 telah disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak diperlukan. Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.

Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di sisi lain, konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri keuangan. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.⁵⁶

Adapun dalam *peer to peer lending*, masyarakat selaku konsumen sektor jasa keuangan maupun bukan konsumen jasa keuangan mendapat perhatian sebagai pengawasan terintegrasi oleh OJK. Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan *fintech*, dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun

⁵⁶ *Ibid*,h. 54

investor yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan.⁵⁷

C. Peer to Peer Lending

1. Pengertian Peer to Peer Lending

Industri ini sekarang sangat diminati banyak orang di Indonesia karena memiliki banyak manfaat dalam dunia keuangan. *Fintech lending* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵⁸

Peer to peer lending (P2L) merupakan salah satu bentuk *fintech* yang mana pengertian P2L merupakan skema layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara online.⁵⁹ P2L diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶⁰

⁵⁷ Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment : Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014),h. 92

⁵⁸ Bank Indonesia, “Teknologi Finansial” (On-line), tersedia di: <https://www.bi.go.id/id/system-pembayaran-fintech/Contents/default.aspx.htm> (10 Juli 2020)

⁵⁹ “Bentuk Layanan peer to peer lending” (On-Line), tersedia di: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10462.htm> (10 Juli 2020)

⁶⁰ Undang-Undang No. 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 ayat (3)

Adapun pengertian *Peer to Peer Lending*, menurut OJK yakni merupakan praktik meminjam dan memberikan pinjaman secara online melalui sebuah wadah yang disebut *platform*. *Platform* sendiri merupakan wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Yang mana dapat disimpulkan bahwa P2L (Pinjaman Online) merupakan transaksi pinjam meminjam yang dilakukan melalui *platform* yang mempertemukan antara orang yang mempunyai kelebihan dana (*lender*) dengan orang yang kekurangan dana (*borrower*) yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet (smartphone, tablet, computer, laptop, notebook) yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional. Namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu system keuangan.⁶¹

Serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta menjamin risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal.

2. Manfaat Peer to Peer Lending

Berikut beberapa manfaat hadirnya layanan *peer to peer lending* bagi Indonesia adalah sebagai berikut:

⁶¹ *Ibid* h. 365

a. Membantu Meningkatkan Potensi Ekonomi Indonesia

Salah satu elemen kunci yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara efektif adalah pemanfaatan kredit untuk modal usaha agar dapat mempercepat kemampuan produksi. Pemanfaatan teknologi digital untuk membantu pihak *unbanked* dapat meningkatkan PDB setidaknya sebesar 2 % hingga 3% di Indonesia. Potensi peningkatan ekonomi nasional berasal dari kalangan menengah ke bawah dan UMKM. Total ada 186 juta individu usia produktif yang masuk dalam segmen pengeluaran per kapita menengah kebawah, dan ada 63 juta bisnis UMKM di Indonesia, serta mayoritas belum memiliki akses kredit. Sehingga menjadi peluang yang besar bagi para pelaku *fintech lending* untuk membantu memberi mereka akses ke permodalan.

b. Memberi Akses Pada Individu dan UMKM Yang Kurang Terlayani

Fintech lending juga memiliki fungsi untuk membuka peluang yang sama bagi siapa saja. Karena, setiap usaha apalagi UMKM diharapkan bisa tumbuh dan berkembang di negerinya sendiri. Apalagi sekarang ditunjang oleh platform pemasaran yang beragam sehingga memudahkan para pelaku UMKM memasarkan produknya mereka. Semakin banyak produk yang ada semakin besar juga modal yang dibutuhkan. Dengan hadirnya layanan *peer to peer lending* dapat memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha agar bisnis mereka bisa maju.

c. Menjadi Sumber Pembiayaan Yang Kuat Melalui Kolaborasi Dengan Lembaga Keuangan

Fintech lending bisa saja tidak terbatas hanya pada layanan *peer to peer lending*, namun bisa berkembang menuju model *institutional to peer*. Sebab, dibutuhkan sumber dana berkelanjutan untuk memenuhi tingginya permintaan pinjaman *fintech*. Hal tersebut bisa diwujudkan melalui kerjasama antara *fintech lending* dengan *institutional* seperti lembaga keuangan dan perusahaan investasi untuk bantu menyediakan sumber dana yang lebih stabil dan manfaat dari berbagai infrastruktur.

d. Mencapai Inklusi Keuangan Dengan Mendukung Inovasi

Kehadiran *fintech lending* menciptakan dampak positif bagi penduduk Indonesia, yang mana dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui peningkatan akses kredit untuk UMKM dan individu, mengundang lebih banyak investor, serta memperluas peluang kerja. Ini sejalan dengan kontribusi terhadap inisiatif inklusi keuangan dengan memperluas jangkauan target pasar.

3. Kelebihan dan Kekurangan Peer to Peer Lending

Finansial teknologi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat yang akan menggunakan layanan tersebut. Menurut Otoritas Jasa Keuangan,⁶²

Kelebihan dari Finansial Teknologi adalah:

⁶² Muliaman D. Hadad, "Peluang dan Tantangan Fintech dalam Memperluas Akses Keuangan" (On-line), tersedia di: <http://www.ojk.go.id/id/nertita.htm> (13 Juli 2016)

- a. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- b. Menjadi alternative pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternative pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kekurangan dari Finansial Teknologi adalah:

- a. Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank.
- b. Ada sebagian perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman.

4. Uraian Akad **Peer to Peer Lending**

Fintech dalam jenis peminjaman ini dapat dikategorikan sebagai akad *Al-Qhordhu* atau *Qard*. Qard dalam terminology syariah dapat diartikan sebagai akad pinjaman dari pemberi pinjaman (*Muqridh*) kepada pihak peminjam (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Perbuatan tolong-menolong ini dibolehkan dalam islam, berdasarkan dalil berikut:

Allah berfirman dalam Al-Quran:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadid : 11)

Dari penjelasan diatas bahwa perbuatan meminjamkan uang dibolehkan dalam islam, bahkan dijanjikan balasan yang lebih baik. Memudahkan kesulitan sesama muslim juga merupakan pengamalan dari hadist nabi yang menyebutkan ganjaran kemudahan di dunia dan akhirat bagi orang yang memudahkan kesulitan sesama muslim.

Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya:

“Barangsiapa menghilangkan kesulitan seorang mu’min di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang tengah dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat”. (HR. Muslim).⁶³

D. Maqashid Syariah

1. Definisi dan Teori Maqashid Syariah

Secara etimologi maqashid syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata maqashid dan al syariah.

⁶³ “Fintech Potensi Rentenir dalam Genggaman” (On-Line), tersedia di: <http://sekolahmuamalah.com/fintech-potensi-rentenir-dalam-genggaman.htm> (18 Agustus 2020)

Maqashid adalah bentuk plural dari maqsud, qasd, maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada yaqsudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah al nusush al muqaddasah (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, maqasid al syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.⁶⁴

Membicarakan tentang maqashid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.⁶⁵

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang maqashid syariah, yaitu sebagai berikut :

⁶⁴ Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal), h. 2

⁶⁵ Ghofar Shidiq, *Op. Cit.* h. 117

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan maqashid syariah yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.⁶⁶
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa maqashid syariah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama.

Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan maqashid syariah dapat membuat hukum islam lebih flexibel.⁶⁷

- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqashid syariah bisa berupa maqashid syariah al-ammah yang meliputi keseluruhan aspek syariat.

Maqashid syariah al khasah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqashid al syariah pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lainlain, atau maqashid syariah al juz'iyah yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.⁶⁸ Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang maqashid syariah harus tetap

⁶⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64-66

⁶⁷ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3

⁶⁸ Moh. Toruquddin, *Op. Cit.* h. 2

layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan.

Pertama, teori maqashid syariah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah ta'ʿlil (penetapan hukum berdasarkan illat), dan al-mashalih wa al-mafasid (kemaslahatan dan kerusakan).⁶⁹

Kedua, Teori maqashid syariah Ibnu Ashur secara global didasarkan pada maqashid al ammah dan maqashid al khasah, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid dengan menggunakan fitrah, maslahah, dan ta'ʿlil. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.⁷⁰

Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syariah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini

⁶⁹ Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), h. 33

⁷⁰ Moh. Toruquddin, *Op. Cit.* h. 1

telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan terhadap maqashid syariah ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁷¹

Bahwasannya inti daripada teori maqashid syariah berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

2. Maksud dan Tujuan Syariah

Para ulama saalaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (illah) dan juga tujuan (maqashid), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga

⁷¹ Ghofar Shidiq, Op. Cit. h. 119-120

kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.

Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid syariah ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang maqashid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah maqashid syariah bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.⁷²

3. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah ialah tujuan atau rahasia yang di tetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, maqashid syariah ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia

⁷² Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah) (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 43-46

kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep maqashid syariah merupakan lanjutan dari konsep masalah. Masalah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu masalah mu'tabar (didukung oleh syara'), masalah mulghah (ditolak syara') dan masalah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan al-Hadist).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalah, jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (ijabiyyah) dan aspek negatif (salbiyah).⁷³

Ada dua konsep berfikir konsumen muslim yang hadir dalam dunia ekonomi hingga saat ini. Konsep pertama adalah utilitas, konsep utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang atau jasa. Konsep kedua adalah masalah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan dan prioritas, dia sangat berbeda dengan utilitas yang pemetaan majemuknya tidak terbatas. Dua konsep ini berbeda karena dibentuk oleh masing-masing epistemologi yang berbeda. Dengan demikian perilaku konsumen terintegrasi dengan corak rasionalisme, dan norma agama sengaja dikesampingkan.⁷⁴

Teori masalah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif

⁷³ Kwat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 125

⁷⁴ Agil Bahsoan, Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034), h. 118

kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena mashlahah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep mashlahah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.⁷⁵



⁷⁵ *Ibid.* h. 119

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kadir Arno dan A. Ziaul Assad, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong. *Journal of Islamic Economic Law*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, Sulawesi Selatan.
- Abdul Karim. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*. Jakarta : Amzah, 2013.
- Adi Setaidi Saputra, Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Agus Suwandono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok : Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, 2018.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013.
- Bima, Widhi Ariyo, dan Alvin Tiyanasyah, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi Fintech Lending. *Jurnal Keuangan & Perbankan*, Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas IBN Khaldun, Bogor.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Dewi Indah Hanggono R.W, Wawancara dengan penulis, Otoritas Jasa Keuangan, Lampung, 2021.
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Fadlan, Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Jawa Tengah.

Fan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Alifabeta 2014.

Ghofar Sidiq, Teori Maqashid Al- Syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Institut Pesantren Mathaliul Falah, Pati Jawa Tengah.

Hadad, Muliaman D, Financial Technology di Indonesia, Makalah yang disampaikan pada *Acara Kuliah Umum tentang Fintech – IBS*, yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013

Heryucha Romanna Tampubolon, Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Jurusan Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Iwayan Bagus Pratama dkk, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Jadzil Baihaqi, Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, STAIN Kudus, Jawa Timur.

Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2014.

Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.

Kornelius Benuf, Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran
Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Lina Maulidian, Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga
Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia, *Jurnal Keadilan
Progresif*, Jurusan Hukum Ekonomi, Fakultas Syariah, IAIN
Palopo, Sulawesi Selatan.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : PT. Lkis
Printing Cemerlang, 2009.

Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia
dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah
Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Jurusan Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Depok:
Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, 2018.

Ryan Filbert Wijaya, *Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia
Investasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2014.

Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan* Jakarta
: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.

Sujatmo, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

V. Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* Yogyakarta : Pustaka Baru, 2015.

Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 2006.

